

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Theory of Planned Behaviour adalah salah satu teori yang cukup sering digunakan dalam penelitian yang menyangkut perilaku (K. N. Putra et al., 2024). Ajzen, 1991 dalam (K. N. Putra et al., 2024) menyatakan niat perilaku merupakan faktor penting yang menentukan seseorang untuk melakukan perilaku. Dari niat perilaku ini yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perilaku. *Theory of Planned Behaviour* adalah teori yang mengidentifikasi bentuk keyakinan seseorang mengenai kendali atas sesuatu yang terjadi akibat suatu perilaku. Hal inilah yang membuat perbedaan antara seseorang yang berkehendak, dengan orang yang tidak berkehendak.

Menurut Ajzen, 1991 dalam (K. N. Putra et al., 2024) semakin besar motivasi untuk perilaku dan norma subjektif berbanding lurus dengan perilaku, dan semakin besar kendali perilaku persepsian, semakin kuat pula niat perilaku seseorang untuk melakukan perilaku yang sebelumnya sudah dipertimbangkan. *Theory of Planned Behaviour* dibagi menjadi tiga jenis kepercayaan diantaranya adalah *behavioral belief*, *control belief* dan *normative belief*. Ketiga jenis kepercayaan ini berkaitan dengan konstruksi sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan (K. N. Putra et al., 2024).

2.1.2 Kriteria UMKM

2.1.2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu membuktikan keberhasilannya pada saat keadaan perekonomian Indonesia krisis moneter di tahun 1998. UMKM cenderung relatif lebih mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar yang banyak bangkrut pada saat itu (LPPI, 2015). Salah satu yang membuat UMKM lebih mampu bertahan ditengah badai krisis moneter adalah karena mayoritas UMKM tidak menggunakan modal atau pinjaman yang berasal dari luar negeri dengan mata uang asing.

Menurut (R. Putra et al., 2023) UMKM merupakan pengertian dari usaha kecil yang tidak dapat didefinisikan secara universal. Telah banyak cara yang dilakukan untuk dapat mendefinisikan bisnis kecil ini mulai dari jumlah tenaga kerja, jumlah aset, dan jumlah pendapatan. Beberapa dasar yang sering digunakan juga termasuk ukuran tenaga kerja, total aset, jumlah investasi dan tingkat penjualan. UMKM adalah salah satu penopang dalam pembangunan ekonomi dalam sebuah negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah bentuk usaha yang diolah oleh seorang individu atau sekelompok orang dengan menggunakan modal dan membangun suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan kemampuan mengembangkan usaha dengan proses yang mudah (Hadisantoso et al., 2023). Kebanyakan UMKM adalah usaha keluarga, hal ini berarti usaha tersebut dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha beserta keluarganya.

2.1.2.2 Klasifikasi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok dalam perspektif usaha (LPPI, 2015) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UMKM dalam sektor informal, misalnya pedagang kaki lima
2. UMKM jenis Mikro yaitu para pelaku UMKM yang memiliki kemampuan sifat pengrajin namun tidak terlalu memiliki jiwa kewirausahaan untuk membuat usahanya berkembang
3. Usaha Kecil Dinamis yaitu kelompok pelaku UMKM yang dapat berwirausaha dengan membuat kerjasama dan kegiatan ekspor
4. Perusahaan yang bergerak cepat (*Fast Moving Enterprise*) yaitu UMKM yang mempunyai sifat kewirausahaan yang baik dan siap untuk bertransformasi menjadi usaha yang besar

Dalam Undang- undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 20 Tahun 2008 dalam (LPPI, 2015) UMKM dideskripsikan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu dapat digolongkan sebagai UMKM.

2.1.2.3 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Ukuran usaha merupakan jumlah besar atau kecilnya sebuah entitas atau badan usaha yang diukur melalui beberapa metode. Salah satu diantaranya adalah dengan melihat banyaknya penjualan, nilai aset dan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan tersebut. Kriteria jumlah tenaga kerja atau karyawan yang menjadi

dasar menentukan sebuah usaha kecil atau besar. Menurut (LPPI, 2015) seperti berikut ini:

- a. Usaha Mikro: 10 orang
- b. Usaha Kecil: 30 orang
- c. Usaha Menengah: 300 orang

Ukuran suatu usaha seperti yang disebutkan diatas, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 (Kautsar & Rejeki, 2020).

2.1.2.4 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Kekayaan

Menurut Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam (Rejeki, 2020), kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau/ badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai total kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 kecuali tanah dan gedung tempat mendirikan usaha
- b. Mempunyai total hasil penjualan maksimal Rp 300.000.000,00

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000,00 sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 kecuali tanah dan bangunan tempat mendirikan usaha
- b. Memiliki hasil penjualan diatas Rp 300.000.000,00 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,00

3. Usaha Menengah

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai total kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 kecuali tanah dan bangunan tempat mendirikan usaha
- b. Mempunyai total hasil penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,00

Karakteristik UMKM lainnya seperti yang dipaparkan dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008, antara lain bahwa usaha kecil dan usaha menengah bukanlah anak dari perusahaan lain (Sodikin, 2021).

Tabel 2. 1 Karakteristik UMKM

Jenis UMKM	Kriteria		
	Jumlah Tenaga Kerja	Kekayaan Bersih	Penghasilan
Usaha Mikro	10 orang	Maksimal Rp 50.000.000	Maksimal Rp 300.000.000
Usaha Kecil	30 orang	> Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000	> Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000
Usaha Menengah	300 orang	> Rp 500.000.000 - Rp 10.000.000.000	> Rp 2.500.000.000 - Rp 50.000.000.000

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

2.1.3.1 Pengertian SAK EMKM

SAK EMKM adalah standar khusus entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan seperti yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam (Rejeki, 2020). SAK EMKM tegas menjelaskan konsep entitas bisnis agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus mampu memisahkan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan beserta hasil dari usaha entitas itu, dan juga antara suatu usaha atau entitas yang satu dengan usaha atau entitas yang lainnya.

Teori akuntansi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, hal ini juga berpengaruh pada perkembangan teori akuntansi diberbagai negara. Ada dua jenis standar akuntansi yang digunakan yaitu GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan IFRS (*International Financial Reporting Standard*)

yang terus mengalami perubahan (Hidayati et al., 2023). Namun, saat ini Indonesia memiliki standar akuntansi yang khusus pelaporan keuangan UKM atau UMKM yang biasa disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat SAK EMKM. Standar ini merupakan salah satu motivasi bagi para pengusaha- pengusaha Indonesia agar secara signifikan untuk perkembangan bisnis UMKM.

Jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat lebih sederhana (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya sejatinya menggunakan biaya historis sehingga untuk melakukan pencatatan aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan SAK EMKM tetap memerlukan pertimbangan apakah ketentuan yang dibuat di SAK EMKM sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas bisnis itu. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan dibuat, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang disediakan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan entitas bisnis tersebut.

2.1.3.2 Perbedaan SAK EMKM dengan SAK ETAP dan PSAK 1

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018 SAK EMKM berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 (Muchlis Mustarini & Nurul Fathah, 2023), menggantikan SAK pendahulunya tentang elemen laporan keuangan, yaitu SAK ETAP dan PSAK 1. Beberapa perbedaan kedua SAK tersebut adalah sebagai berikut. Menurut (Susanto

et al., 2020) secara garis besar, PSAK 1 memiliki beberapa komponen laporan keuangan yang tercakup didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan posisi keuangan awal periode terdekat

Sementara itu, dalam SAK ETAP (Fauziah & Reviandani, 2023), komponen laporan keuangan yang tercakup adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan tidak berdasarkan nilai wajar, tetapi diukur dengan harga perolehan dan nilai wajar
2. Menggunakan istilah laporan laba rugi
3. Laporan arus kas yang digunakan adalah metode tidak langsung

Dibandingkan, dengan dua standar akuntansi pendahulunya, SAK EMKM dibuat lebih sederhana (Sulistiyani, 2022), dengan bebapa komponen tercakupnya adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode atau laporan kinerja
3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun akun tertentu yang relevan.

Dapat diambil garis besar, dari beberapa perbedaan antar kedua standar akuntansi keuangan yang disebutkna diatas, SAK EMKM meniadakan laporan arus kas dengan pertimbangan bahwa laporan ini dinilai cukup rumit untuk disusun oleh pelaku UMKM mengingat banyaknya pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam membuat laporan keuangan.

2.1.3.3 Penyajian Laporan Keuangan EMKM

Penyajian laporan keuangan SAK EMKM mengharuskan entitas menyajikan informasi yang wajar. Penyajian informasi yang wajar untuk mencapai beberapa tujuan seperti, relevan, representasi tepat, keterbandingan dan keterpahaman (Ayudhi, 2020). Prinsip Relevansi dan Keandalan yang diuraikan dalam SAK EMKM dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada pengguna laporan keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Relevansi menunjukkan bahwa informasi tersebut harus membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan keandalan menandakan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan yang signifikan dan dapat diandalkan oleh pengguna.

Kesederhanaan dan Aksesibilitas SAK EMKM dirancang untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan entitas kecil hingga menengah, yang biasanya tidak memiliki sumber daya akuntansi yang rumit. Akibatnya, standar ini menawarkan pendekatan yang lebih mudah daripada SAK lainnya, seperti SAK Umum atau SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) (Yuliati et al., 2019). Penekanannya adalah pada kemudahan penerapan bagi entitas yang tidak memiliki personel akuntansi profesional.

Kepatuhan pada Kerangka Dasar SAK SAK EMKM sejalan dengan prinsip dasar standar akuntansi di Indonesia, yang mencakup konsep-konsep penting seperti basis akrual, kelangsungan usaha, dan perbedaan antara entitas dan pemiliknya. Selain itu, standar ini dikembangkan sejalan dengan prinsip-prinsip inti akuntansi internasional yang dianut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (IAI, 2019).

2.1.3.4 Bentuk Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan pada mereka (Dian & Setiawati, 2017). Untuk menerapkan prinsip dan mencapai tujuan pemberdayaan UMKM, penyajian laporan keuangan mengacu pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miro, Kecil, dan Menengah.

Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terdiri dari laporan keuangan seperti berikut ini (DSAK IAI, 2022):

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca, yang terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas. Unsur- unsur dalam laporan posisi keuangan terdiri dari:

- a. Aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan atau entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaatnya diharapkan dimasa depan akan diperoleh oleh entitas.
- b. Liabilitas yaitu utang atau kewajiban perusahaan atau entitas saat ini yang muncul karena peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan
- c. Ekuitas yaitu sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya

Contoh pos atau akun yang dapat dikategorikan sebagai unsur- unsur dalam neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Contoh Pos atau Akun Neraca

Aset	Liabilitas	Ekuitas
Kas dan Bank	Utang Usaha	Modal Pak Sanyoto
Surat Berharga (Efek)	Utang Gaji dan Upah	Modal Bu Sinta
Piutang Usaha	Utang Wesel	Modal Pak Budi
Bahan Habis Pakai	Utang Bank	Modal Saham Biasa
Tanah	Utang Hipotik	Agio Modal Saham Biasa
Bangunan	Utang PPh 21	Saldo Laba
Peralatan	Utang PPN	Saldo Laba
Hak Paten	Pendapatan Diterima di Muka	
Persekot Asuransi	Utang Advertensi	

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
<i>JUMLAH ASET</i>		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	8	xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>			
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS & LIABILITAS</i>		xxx	xxx

Gambar 2. 1 Format Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan hasil kinerja keuangan entitas dalam satu periode. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup akun pendapatan, biaya keuangan, dan beban pajak. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. SAK EMKM mengatur perlakuan untuk akibat koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesaian masa lalu dan bukan sebagai bagian dari laba rugi dalam periode perubahan yang terjadi.

Contoh pos atau akun yang dikategorikan sebagai unsur- unsur dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut

Tabel 2. 3 Contoh Pos atau Akun Laporan Laba Rugi

Penghasilan (<i>Income</i>)	Beban (<i>Expenses</i>)
Pendapatan (<i>Revenues</i>)	Beban
Penjualan Barang Dagangan	Beban Penyusutan
Pendapatan Sewa	Beban Amortisasi
Pendapatan Royalti	Beban Gaji dan Upah
Pendapatan Bunga	Beban Pokok Pejualan
Pendapatan Dividen	Beban Administrasi
Keuntungan (<i>Gains</i>)	Kerugian (<i>Losses</i>)
Keuntungan Pelepasan Aset Tetap	Kerugian Pelepasan Aset Tetap
Keuntungan Pelepasan Surat Berharga	Kerugian Pelepasan Surat Berharga

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	Catatan	20X8	20X7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain- lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain- lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Gambar 2. 2 Format Laporan Laba Rugi

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan berupa penjelasan rinci atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta tambahan informasi lain. Catatan atas laporan keuangan setidaknya memuat beberapa hal berikut:

- a. Sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi

- c. Informasi tambahan dan rincian tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi semua pengguna dengan tujuan memahami laporan keuangan

**ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8**

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S. H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. *Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead* variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	20X8	20X7
Kas kecil Jakarta-Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	20X8	20X7
PT Bank xxx- Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	20X8	20X7
PT Bank xxx- Rupiah	xxx	xxx
Suku bunga- Rupiah	4,50%	5,00%

6. PIUTANG USAHA

	20X8	20X7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	20X8	20X7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8		
8. UTANG BANK		
Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	20X8	20X7
Penjualan	xxx	xxx
Return penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN- LAIN		
	20X8	20X7
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain- lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	20X8	20X7
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Gambar 2. 3 Contoh Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.3.5 Tujuan Standar Akuntansi Keuangan EMKM

Tujuan SAK EMKM adalah untuk memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar umum, tetap dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna laporan tersebut. Standar ini meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi entitas yang lebih kecil sekaligus mendorong kemudahan akses terhadap pembiayaan (Inayatullah et al., 2024).

2.1.4 Tingkat Kesadaran Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan

Keuangan

2.1.4.1 Kesadaran Pentingnya Menyusun Laporan Keuangan

Kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya laporan akuntansi dan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan mereka untuk membuat laporan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran ini antara lain pendidikan, pengalaman, dan akses informasi (Periska & Rachpriliani, 2024).

Laporan keuangan membantu UMKM mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan pendanaan, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan bagi UMKM masih relatif rendah dan seringkali diperlukan program pelatihan dan pendidikan khusus.

Salah satu penyebab masih rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan adalah rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap manfaat dari pembukuan atau penyusunan pelaporan keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh semua entitas, termasuk pedagang-pedagang kecil sebagai entitas sebuah bisnis (Hermelinda, Meriana, & Sitorus, 2022).

2.1.4.2 Manfaat Penyusunan Laporan Keuangan

Penelitian sebelumnya (Rachmawati et al., 2021), menunjukkan bahwa UMKM yang menyadari pentingnya pelaporan keuangan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Pelaporan keuangan yang teratur membantu para pelaku ekonomi untuk menilai situasi keuangan secara lebih akurat, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan mengembangkan strategi keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan konsep mengenai keuangan, laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur hasil dan perkembangan usaha dari masa ke masa dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Menurut (Hermelinda et al., 2022), laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan saat ini maupun kondisi keuangan dimasa yang akan datang (*forecast analyzing*).

Menyusun laporan keuangan memberikan beberapa manfaat (Rachmawati et al., 2021) diantaranya adalah:

1. Akan lebih mudah ketika pengajuan modal pada pihak ketiga
2. Akan lebih mudah dalam pengajuan kredit pada pihak ketiga
3. Memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan tentang kondisi perusahaan
4. Memberikan gambaran tentang perkembangan bisnis perusahaan
5. Akan lebih mudah menghitung pajak terutang

2.1.5 Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Kesiapan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menganggap laporan keuangan sebagai alat penting untuk mengukur kinerja keuangan, mengendalikan biaya, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Mengakses dana eksternal seperti pinjaman bank dan investasi juga difasilitasi oleh laporan keuangan, yang membuat laporan keuangan menjadi sangat penting karena pemberi pinjaman atau investor memerlukan informasi yang akurat dan transparan untuk dapat menilai kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya. Indikator kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan antara lain adalah pemahaman prinsip dasar akuntansi, kemampuan menggunakan software akuntansi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas (Rachmawati et al., 2021).

Menurut (Periska & Rachpriliani, 2024) semakin siap pelaku UMKM menggunakan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan semakin siap memahami dasar akuntansi dan standar akuntansi EMKM. Semakin siap pelaku UMKM memahami langkah- langkah penyusunan laporan keuangan, maka akan semakin besar kemungkinan mereka menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Dari penelitian yang dilakukan (Hadisantoso et al., 2023) UMKM tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan UMKM dalam menyusun laporan keuangannya, karena kurang memahami bagaimana penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang seharusnya dikhususkan untuk jenis usaha tersebut. Pelaku UMKM juga menganggap bahwa pencatatan keuangan yang sudah mereka

lakukan sudah cukup jelas dan efektif. Sementara itu, kesiapan seseorang dapat dilihat bilamana mereka siap untuk memberikan respon pada situasi baru (Dewi & Sari, 2019 dalam (Atikasuri et al., 2024)).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian-penelitian terdahulu pada topik-topik terkait digunakan sebagai sumber perbandingan untuk memperoleh inspirasi baru bagi penelitian-penelitian baru. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian (Rachmawati et al., 2021) dengan judul Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memiliki tingkat kesadaran dan kesiapan yang cukup rendah dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Masih banyak juga pelaku UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan dan pajak, namun dalam hal menyusun laporan keuangan, pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM sudah cukup baik. Disisi lain dalam penyusunan pelaporan pajak, pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM kurang baik.

Penelitian (Rejeki, 2020) dengan judul Kesiapan Para Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) menunjukkan bahwa rata-rata pelaku UMKM belum siap menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, rata-rata pelaku UMKM belum menyadari arti pentingnya laporan keuangan bagi pengembangan usaha, rata-rata pelaku UMKM masih lebih fokus pada

pengembangan usaha dan hasil produksi daripada teknologi informasi penyusunan laporan keuangan, dan masih minimnya sosialisasi memperkenalkan SAK EMKM kepada para pelaku UMKM.

Penelitian (Atikasuri et al., 2024) dengan judul Analisis Kesiapan UMKM dalam Implementasikan SAK EMKM: Studi Kasus UMKM Mitra Alfamart di Karawang menunjukkan bahwa enam pelaku usaha yang bekerja sama dengan Alfamart di Karawang belum siap dalam implementasikan SAK EMKM. Sebagian besar UMKM yang bekerja sama dengan Alfamart selama ini menggunakan metode basis cash dimana hal ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan SAK EMKM yang mengharuskan untuk menerapkan secara *accrual basis*.

Penelitian (R. Putra et al., 2023) dengan judul Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Mempawa siap melakukan digitalisasi rekening, hal ini menunjukkan bahwa UMKM optimis dan mau berinovasi serta menjadikan usahanya lebih baik melalui teknologi dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM siap menghadapi tantangan karena dapat mengubah bisnis menjadi lebih baik, meskipun pelaku UMKM kewalahan dalam mempelajari sistem akuntansi manual.

Penelitian (Kholifah & Firmansyah, 2020) yang berjudul *Accounting Is Monster: Kesiapan UMKM Keripik Muris dalam Menerapkan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK- EMKM*. Minimnya tingkat pengetahuan UMKM Keripik Muris

terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK- EMKM. Ketidaksiapan UMKM terhadap pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK- EMKM karena menurut mereka tidak terlalu penting dan tidak adanya keberlanjutan dari pihak pemerintah.

Penelitian (Nurazizah & Zulkarnain, 2022) yang berjudul *Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Kota Sukabumi*. UMKM Mochi Lampion telah menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya, namun hanya sebagian saja. Yaitu dalam hal pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan SAK EMKM seperti aset, kewajiban, modal, persediaan, pendapatan, dan beban.

Penelitian (Hadisantoso et al., 2023) yang berjudul *Readiness to Apply MSMEs Financial Accounting Standards in the Preparation of Financial Reports in UD. Sari Rama Bakery*. UD. Sari Rama Bakery belum mencatat laporan keuangan usahanya sesuai SAK EMKM karena pencatatannya belum sesuai dengan pedoman SAK EMKM, tetapi hanya melakukan pencatatan arus kas masuk dan kas keluar, belum memenuhi unsur penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

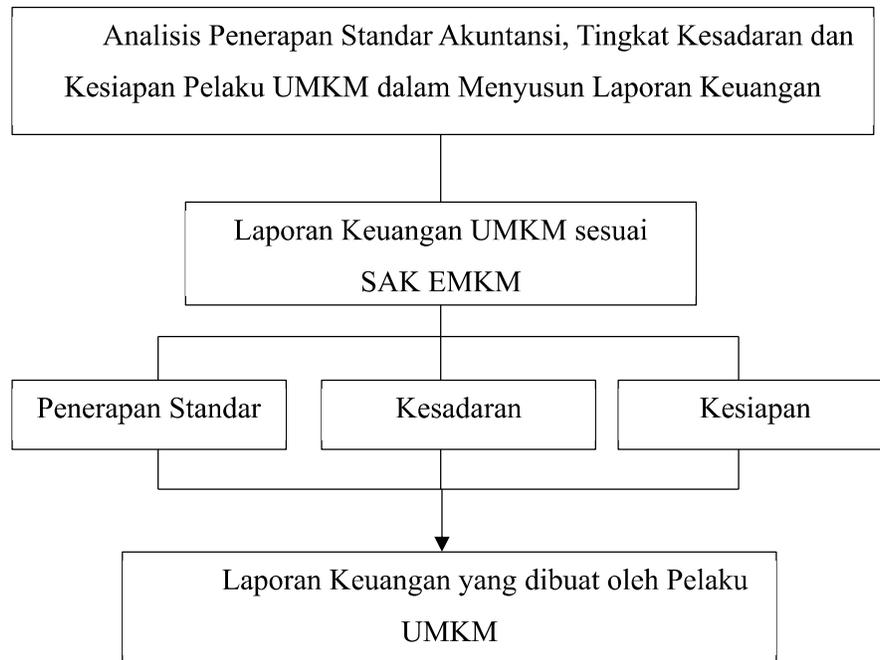
Penelitian (Pakpahan & Naibaho, 2023) yang berjudul *Implementation of Financial Accounting Standards for Small and Medium Entities in Berastagi SMES, Karo District*. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk laporan keuangan yang disajikan para UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM dikarenakan laporan keuangan disajikan hanya didominasi oleh laporan laba rugi dan minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai SAK EMKM.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Rachmawati et al., 2021)	Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memiliki tingkat kesadaran dan kesiapan yang cukup rendah dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Masih banyak juga pelaku UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan dan pajak, namun dalam hal menyusun laporan keuangan, pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM sudah cukup baik. Disisi lain dalam penyusunan pelaporan pajak, pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM kurang baik
2	(Rejeki, 2020)	Kesiapan Para Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)	Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata pelaku UMKM belum siap menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, rata-rata pelaku UMKM belum menyadari arti pentingnya laporan keuangan bagi pengembangan usaha, rata-rata pelaku UMKM masih lebih fokus pada pengembangan usaha dan hasil produksi daripada teknologi informasi penyusunan laporan keuangan, dan masih minimnya sosialisasi memperkenalkan SAK EMKM kepada para pelaku UMKM.
3	(Atikasuri et al., 2024)	Analisis Kesiapan UMKM dalam Implementasikan SAK EMKM: Studi Kasus UMKM Mitra Alfamart di Karawang	Penelitian ini menunjukkan bahwa enam pelaku usaha yang bekerja sama dengan Alfamart di Karawang belum siap dalam implementasikan SAK EMKM. Sebagian besar UMKM yang bekerja sama dengan Alfamart selama ini menggunakan metode <i>basis cash</i> dimana hal ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan SAK EMKM yang mengharuskan untuk menerapkan secara <i>accrual basis</i> .
4	(R. Putra et al., 2023)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan	Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Mempawa siap melakukan digitalisasi rekening, hal ini menunjukkan bahwa UMKM optimis dan mau berinovasi

		Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak	serta menjadikan usahanya lebih baik melalui teknologi dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM siap menghadapi tantangan karena dapat mengubah bisnis menjadi lebih baik, meskipun pelaku UMKM kewalahan dalam mempelajari sistem akuntansi manual.
5	(Kholifah & Firmansyah, 2020)	<i>Accounting Is Monster: Kesiapan UMKM Keripik Muris dalam Menerapkan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya tingkat pengetahuan UMKM Keripik Muris terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM. Ketidaksiapan UMKM terhadap pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM karena menurut mereka tidak terlalu penting dan tidak adanya keberlanjutan dari pihak pemerintah.
6	(Nurazizah & Zulkarnain, 2022)	Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Kota Sukabumi	Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Mochi Lampion telah menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya, namun hanya sebagian saja. Yaitu dalam hal pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan SAK EMKM seperti aset, kewajiban, modal, persediaan, pendapatan, dan beban.
7.	(Hadisantoso et al., 2023b)	<i>Readiness to Apply MSMEs Financial Accounting Standards in the Preparation of Financial Reports in UD. Sari Rama Bakery</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa UD Sari Rama Bakery belum mencatat laporan keuangan usahanya sesuai SAK EMKM karena pencatatannya belum sesuai dengan pedoman SAK EMKM, tetapi hanya melakukan pencatatan arus kas masuk dan kas keluar, belum memenuhi unsur penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.
8.	(Pakpahan & Naibaho, 2023)	<i>Implementation of Financial Accounting Standards for Small and Medium Entities in Berastagi SMES, Karo District</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk laporan keuangan yang disajikan para UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM dikarenakan laporan keuangan disajikan hanya didominasi oleh laporan laba rugi dan minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai SAK EMKM.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan sebuah pernyataan atau dugaan yang dibuat berdasarkan pengamatan awal dan teori yang ada, yang kemudian diuji melalui penelitian ilmiah. Hipotesis ini berfungsi sebagai panduan dalam penelitian, membantu peneliti menentukan arah dan fokus penelitian. Hipotesis biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini lingkup hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₁: Pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM

H₂: Pelaku UMKM sudah memiliki kesadaran dalam menyusun laporan keuangan

H₃: Pelaku UMKM belum memiliki kesiapan dalam menyusun laporan keuangan